

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Responden

Dari hasil penelitian tentang pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang identitas responden. Identitas responden ini perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara jawaban yang diberikan oleh responden terhadap analisa yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian ini.

##### 5.1.1 Umur Responden

Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, dapat diketahui tingkat umur responden. Tingkatan umur responden merupakan salah satu yang mempengaruhi kedewasaan responden dalam menganalisa suatu permasalahan. Untuk mengetahui umur responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	21-30 Tahun	35	38,45 %
2.	31-40 Tahun	20	21,97 %
3	41-50 Tahun	15	16,48 %
4.	51-60 Tahun	13	14,28 %
5.	61- 80 Tahun	8	8,79 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Responden yang lebih banyak menjawab yaitu yang berusia 21-30 tahun sebanyak 35 orang ( 38,45 %) dan responden yang paling sedikit yaitu berusia 61-80 tahun (8,79 %).

### 5.1.2 Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2 : Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	49	53,84 %
2.	Perempuan	42	46,15 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden paling banyak adalah laki-laki yang berjumlah 49 orang (53,84 %) sedangkan jenis kelamin perempuan hanya berjumlah 42 orang (46,15 %).

### 5.1.3 Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden merupakan salah satu hal penting karena dengan pendidikan akan dapat mengukur kemampuan seorang dalam menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang ditempuh responden berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.3 : Persentase Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	54	59,34 %
2.	SMP	17	18,63 %
3.	SMA	19	20,87 %
4.	S1	1	1,09 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah tingkat pendidikan SD berjumlah 54 orang (39,34 %). Dan kemudian responden yang paling sedikit yang memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 1 orang (1,09 %).

#### **5.1.4 Agama Responden**

Untuk mengetahui agama yang dianut oleh responden, maka dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

**Tabel 5.4 : Agama yang Dianut oleh Responden**

No.	Agama Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Islam	87	95,60 %
2.	Kristen Protestan	4	4,39 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua responden yang berjumlah 91 orang menganut agama Islam dan Kristen Protestan. Jumlah responden yang beragama Islam Berjumlah yakni 87 orang (95,60%) sedangkan responden yang beragama Kristen Protestan hanya

berjumlah 4 orang (4,39 %). Jadi, mayoritas responden pada penelitian ini adalah beragama Islam. Yaitu dengan jumlah persentase 95,60 %.

## **5.2 Analisa Data**

### **5.2.1 Observasi/ Pengamatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi. Observasi yang penulis lakukan pada bulan November sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden. Dalam melakukan pengamatan penulis turun ke lapangan yaitu di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Banyak penulis temui di lapangan bahwasannya masyarakat merasa kecewa kepada Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I, salah satu warga masyarakat telah penulis temui dan ia bernama Bapak Rusli dia mengatakan:

*“Pembangunan di desa Kubu I ini sangat rendah jika dibandingkan dengan desa- desa lainnya yang berada di Kecamatan Pekaitan. Saya sebagai masyarakat kecewa terhadap pemerintahan desa yang belum mampu melaksanakan pembangunan dengan baik terutama pembangunan jalan”.*

Dari pernyataan di atas bahwasannya terdapat masalah mengapa di desa Kubu I pembangunannya rendah jika dibandingkan dengan desa- desa yang lain di kecamatan pekaitan kabupaten Rokan Hilir. Disamping itu penulis mendapatkan data pada Kantor Penghulu Kubu I dan Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir sebagai berikut :

**Tabel 5.5 : Data Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir 2013**

No	Jenis Pembangunan Infrastruktur	Volume	Jumlah Anggaran	Hasil	Jumlah Anggaran terlaksana
1.	puskesmas/ posyandu	1 Unit	Rp. 400.000.000	-	-
2.	Pembangunan Kantor Penghulu Kubu I	1 Unit	Rp.470.000.000	Terlaksana	Rp.470.000.000
3.	Pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Desa	4 x 12 M	Rp.470.000.00	-	-
4.	Pembangunan Dermaga Nelayan di Desa Kubu I	10x 12 M	Rp.200.000.000	-	-
5.	Pembangunan Tempat Ibadah	3 Unit	Rp. 40.000.000	Terlaksana	Rp.40.000.000
6.	Semenisasi Jalan	300 M	Rp.330.000.00	-	-
7.	Gedung Sekolah/ Sarana Pendidikan	3 Unit	Rp. 345.000.000	Terlaksana	Rp.345.000.000
8.	Sarana Olahraga	Gedung remaja	Rp.150.000.000	-	-
9.	Listrik	lengkap	Rp.400.000.000	-	-
10.	Rumah Layak Huni	2 Unit	Rp. 146.000.000	Terlaksana	Rp.146.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.2951000000</b>	<b>9 unit</b>	<b>Rp.1.001.000.000</b>

*Sumber : Kantor Desa Kubu I Kec. Pekaitan Kab. Rohil 2013*

Berdasarkan tabel diatas bahwa Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Sangat rendah. Bisa dilihat pembangunan Infrastruktur yang terlaksana hanyalah sedikit.

Dalam observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I memiliki Hambatan/ Kendala-Kendala, sehingga pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan pemerintah Daerah setempat.

### **5.2.2 Kuesioner/Angket**

Analisa data dari jawaban responden mengenai Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, dimana pernyataan dikelompokkan ke dalam tabel berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

### **5.3 Sumber Dana Pembangunan Desa**

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 yang membahas mengenai Perencanaan Pembangunan Desa, bahwasannya ada lima jenis sumber pendanaan dalam perencanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APB-Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Perencanaan pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I memiliki sumber dana untuk melaksanakan pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I, adapun sumber pendanaan pembangunan di desa Kubu I pada tahun 2013 sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
2. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2013
3. Iuran masyarakat.

Adapun Kas desa Kubu I yang bersumber dari iuran Masyarakat Rp.50.000 / tahun, iuran pandapatan penghasilan/ dinamakan lumbung padi untuk kas desa dan uang denda dari masyarakat jika ada gotong royong masyarakat tidak ikut maka akan di denda ini merupakan kebijakan penghulu Kubu I agar semua kebijakan desa selalu di patuhi.

#### **5.4 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**

Pembangunan pedesaan haruslah merupakan inner will, yaitu suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri (Tjokroamidjojo, 1983)

Cara yang digunakan di Indonesia dalam membangun desa, adalah ,meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa swasembada (maju) melalui desa swakarsa (transisi), diadakan peningkatan kegiatan sosial ekonomi serta membangun prasarananya yang diperlukan, sehingga pendapatan perkapita bertambah. Indikator dalam menilai, tipologi desa tadi (swadaya, swakarsa, swasembada) adalah: alam, manusia, letak desa, mata pencaharian, produksi, adat, kelembagaan, pendidikan, swadaya, gotong royong, prasarana dan administrasi.

Program Pembangunan infrastruktur pedesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk desa yang ada sangat mempengaruhi usulan kegiatan infrastruktur pedesaan tersebut , bentuk- bentuk desa yang ada seperti desa memusat pegunungan, memusat

fasilitas, bentuk desa linear ataupun desa tepi pantai sangat berpengaruh terhadap bentuk dan jenis kebutuhan pembangunan infrastruktur pedesaan sehingga tersedia infrastruktur lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan ketrampilan (*human investment*) didalam penyelenggaraan prasarana lokal.

Kebutuhan pokok manusia pada umumnya dan manusia di pedesaan pada khususnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga yang dapat dinyatakan dapat memenuhi persyaratan untuk hidup. Kedua, yang meliputi kebutuhan berupa sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat dalam makna luas, seperti: air minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, angkutan umum (Daldjoeni, 1998).

Belum ada ketentuan mengenai jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi dasar usulan kegiatan, infrastruktur tersebut dapat berupa jalan poros desa, jalan desa/ lingkungan/ setapak, jalan usaha tani/ inspeksi, jembatan gantung, prasarana air bersih, pasar tradisional, balai desa, lumbung desa, posyandu, sekolah dasar, tambatan perahu, dermaga, tempat penjemuran jala/ ikan, sarana sanitasi dasar, pangkalan angkutan, pintu bagi air, pintu air, saluran tersier, talang, bendung kecil atau tanggul, dan lain lain (Kimpraswil, 2001).

Dari keterangan tersebut infrastruktur pedesaan dapat dikategorikan dalam lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan



infrastruktur pedesaan yaitu: jalan desa, air bersih, listrik, perumahan, irigasi. Dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan, pemerintah dan DPR sepakat memberikan anggaran 500 juta rupiah setiap desa pada tahun anggaran 2013, Program infrastruktur desa tertinggal yang direncanakan meliputi, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik serta kebutuhan masyarakat lainnya. Sedangkan sasaran utama yang hendak dicapai yakni membuka isolasi desa guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak, kegiatan sosial ekonomi meningkat, sehingga kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi diharapkan juga turut meningkat.

Menurut PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa. menetapkan bahwa ada lima tahap yang harus di lakukan desa dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan fasilitas desa diantaranya, *Efektivitas Perencanaan Pembangunan, pelaksanaan Pembangunan, pengawasan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan.* lima langkah ini menjadi Indikator dalam penelitian ini.

#### **5.4.1 : Efektivitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

Menurut D. Conyers dan Hills (1984): Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk

menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

Menurut Barnard (Gypson, 1996), efektivitas adalah mempunyai pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat keefektivan yang dicapai.

Efektifitas Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah seperti diutarakan oleh **(Kodoatie, 2003)**, bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua system yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi (Prisma, 1996).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat **(Grigg, 2000)**.

Dengan demikian perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus berorientasi terhadap lingkungan (kondisi wilayah) dan mengoptimalkan sumber daya yang ada (potensi wilayah). Dalam pelaksanaannya perencanaan infrastruktur pedesaan harus memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas (Bratakusumah, 2004).

Maka untuk menentukan tingkat tingkat efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan, didasarkan pada indikator-indikator efektivitas yang ada yaitu:

- 1) Berorientasi terhadap lingkungan,
- 2) Optimalisasi sumber daya,
- 3) Realisasi Tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan teori-teori, untuk mengukur efektivitas Musrenbangdes berdasarkan kondisi dan potensi wilayah melalui indikator-indikator efektivitas maka, indikator orientasi terhadap lingkungan dalam Musrenbangdes didasarkan pada kondisi geografis wilayah, indikator optimalisasi sumber daya didasarkan pada potensi wilayah, dan indikator realisasi tujuan didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan, lebih jelasnya pengukuran tingkat efektivitas melalui Musrenbangdes dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



*Sumber : Hasil Analisis, 2005*

**Gambar 2.9**

**Pengaruh Efektifitas Musrebang Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah**

Dari Gambar 2.9 dapat dijelaskan bahwa efektivitas perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes berdasarkan kondisi dan potensi wilayah diukur melalui indikator-indikator efektivitas yaitu berdasarkan kondisi wilayah (berorientasi terhadap lingkungan), berdasarkan potensi wilayah (optimalisasi sumber daya), dan realisasi tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah. Sehingga diketahui efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah.

Adapun hasil observasi terhadap perencanaan pembangunan di Desa Kubu I sebagai berikut:

**Tabel 5.6 : Data Perencanaan pembangunan di desa Kubu I Kec. Pekaitan Kab. Rohil tahun 2013**

No	Jenis Perencanaan Pembangunan	Jumlah Anggaran
1.	Semenisasi jalan Kepenghuluan	Rp. 330.000.000
2.	Pembangunan puskesmas	Rp. 400.000.000
3.	Rumah layak huni	Rp. 146.000.000
4.	Pengadaan listrik	Rp.400.000.000
5.	Pembangunan jembatan	Rp. 470.000.000
6.	Gedung sekolah, SD, SMP/ MTSSs.	Rp.345.000.000
7.	Sarana olahraga	Rp. 150.000.000
8.	Pembangunan kantor penghulu	Rp. 475.000.000
9.	Pembangunan Sarana Ibadah	Rp . 40.000.000
10.	Pembangunan Darmaga Nelayan	Rp. 200.000.000
Jumlah		Rp. 2.951.000.000

*Sumber : hasil observasi dan data kepenghuluan Kubu I 2013*

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwasannya perencanaan pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I Sudah baik, namun semua perencanaan pembangunan di desa Kubu I tidak semua terlaksana dengan baik. Dari observasi yang peneliti lakukan bahwasannya tidak terlaksananya perencanaan pembangunan di karenakan ada hambatan/ kendala diantaranya:

1. Dana

Perencanaan pembangunan yang di ajukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten tidak semua di penuhi. Pada tahun 2013 dana pembangunan yang di berikan pemerintah Kabupaten Sebesar Rp.1.000.000.000 untuk di pergunakan membangun sarana desa/ Infrastruktur desa.

2. Kondisi Alam

Wilayah desa Kubu I terletak di wilayah pesisir pantai bagan siapiapi tentunya kondisi alam juga sangat menentukan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Desa Kubu I memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hasil dari obserbvasi peneliti mendapatkan informasi bahwasannya musim hujan berkisar antara bulan Agustus sampai bulan januari. Dan musim kemarau berkisar antara bulan Februari sampai Juli. Kondisi alam yang berada di desa Kubu I sangat berpengaruh dalam proses perencanaan pembangunan di desa tersebut.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya Efektifitas Perencanaan pembangunan yang di lakukan di Desa kubu I terhadap pembangunan telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak RW 03 Desa Kubu yang bernama Bapak Mono ia menyatakan:

*“Perencanaan pembangunan di desa I telah berjalan dengan Baik, perencanaan pembangunan di Desa Kubu I telah di Usulkan sesuai dengan keinginan masyarakat Kubu I di saat Musrebangdes, yang di laksanakan oleh desa”.*

Dari pendapat diatas bahwasannya perencanaan pembangunan di Desa Kubu I telah berjalan dengan baik, namun terdapat permasalahan terhadap perencanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I diantaranya seperti yang di ungkapkan oleh bapak Sekretaris Desa Kubu I Bapak Wawan Kartawan ia menyatakan sebagai berikut:

*“Perencanaan pembangunan telah kami laksanakan, namun semua pelaksanaan pembangunan terkadang tidak semua bisa terlaksana dengan baik di karnakan anggaran Dana, Kabupaten hanya*

*memberi anggaran pembangunan setiap desa Rp.1.000.000.0000,00 dengan banyaknya perencanaan pembangunan dengan dana sedemikian maka banyak perencanaan pembangunan yang belum terealisasi dengan baik, banyak kendala diantaranya kondisi Transportasi, alam dan dana yang minim".*

Untuk melihat jawaban responden tentang Efektivitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.7 :Tanggapan Responden terhadap Pemahaman Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	19	20,87 %
2.	Setuju	57	62,63 %
3.	Kurang Setuju	13	14,28 %
4.	Tidak Setuju	2	2,19 %
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden tersebut mengatakan setuju karena Masyarakat telah banyak mengetahui semua perencanaan pembangunan sebanyak 57 orang responden (62,63 %). Data yang diperoleh juga memberikan jawaban kurang setuju dengan jumlah 13 orang (14,28 %) dan tidak setuju dengan jumlah 2 orang (2,19 %), Masyarakat ini menjawab kurang setuju dan sangat tidak setuju karena mereka menilai dan merasakan bahwa program perencanaan pembangunan Infrastruktur kurang berjalan dengan maksimal. Dapat di buktikan dengan pelaksanaan pembangunan yang kurang baik semua perencanaan tidak berjalan dengan apa yang di rencanakan. Di samping itu

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari perencanaan pembangunan Infrastruktur dapat di lihat dari tabel berikut;

**Tabel 5.8 Tanggapan Responden terhadap Persoalan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	7	7,69 %
2.	Setuju	54	59,34 %
3.	Kurang Setuju	27	29,67 %
4.	Tidak Setuju	3	3,29 %
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju dengan jumlah responden 54 orang (59,34 %), responden menjawab setuju karena masyarakat telah mengetahui mengenai persoalan perencanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I. Adapun reponden yang menjawab kurang setuju sebanyak 27 orang (29,67 %) dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui tentang persoalan perencanaan pembangunan sehingga masyarakat di Desa Kubu I sebagian menganggap bahwa Aparat Desa tidak ada usaha untuk merencanakan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I. Tetapi sebaliknya Aparat Desa Kubu I telah berusaha untuk merencanakan pembangunan dInfrastruktur di Desa Kubu I. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Kepala Desa Kubu I yaitu Bpk Sujono beliau mengatakan :

*“semua perencanaan pembangunan telah kami rencanakan tetapi semua usaha yang kami laksanakan belum juga berbuah hasil karena banyak kendala diantaranya kendala Alam yang tidak mendukung, proposal pembangunan telah kami*



*lampirkan ke pihak kabupaten tetapi hasilnya juga tidak ada respon untuk membangun Desa Kubu I.namun masih ada usaha yang kami lakukan dengan membentuk Swadaya Masyarakat. Mungkin dengan adanya Swadaya ini bisa membantu untuk meningkatkan Pembangunan di Desa ini.”*

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I telah dilaksanakan namun implemntasinya belum berjalan dengan Baik. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden tentang penerapan perencanaan pembangunan di Desa Kubu I dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 5.9 Tanggapan Responden terhadap pemahaman Implementasi Penerapan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	26	28,57 %
2.	Setuju	64	70,32 %
3.	Kurang Setuju	1	1.09 %
4.	Tidak Setuju	0	0 %
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju dengan jumlah responden 64 orang (70,32 %), responden menjawab setuju karena masyarakat telah memahami dengan adanya perencanaan yang baik maka secara otomatis penerapannya akan juga baik. Adapun reponden yang menjawab kurang setuju sebanyak 1 orang (1,09 %) dikarenakan tidak semua perencanaan yang baik hasil penerapannya juga baik. Dan tidak ada satupun dari masyarakat menjawab tidak setuju.

**Tabel 5.10 : Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator Pembangunan infrastruktur di bidang Efektivitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

No	Pertanyaan	Frekuensi/Persentase					Jumlah Responden
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	Saya sebagai Masyarakat sangat memahami tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kec. Pekaitan Kab. Rohil	19 (20,87)	57 (62,63)	13 (14,28)	2 (2,19)	0 (0)	91
2.	Saya telah mengetahui tentang Persoalan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kec. Pekaitan Kab. Rohil	7 (7,69)	54 (59,34)	27 (29,67)	3 (3,29)	0 (0)	91
3.	Dengan adanya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kec. Pekaitan Kab. Rohil maka Akan Efektif Penerapan Pembangunan Infrastruktur dengan baik.	26 (28,57)	64 (70,32)	1 (1,09)	0 (0)	0 (0)	91
<b>Jumlah</b>		52 (57,13)	175 (192,29)	41 (45,04)	5 (5,48)	0 (0)	273

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari indikator Efektivitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang menjawab setuju sebanyak 175 (192,29 %), kemudian responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 52 (57,13 %), selanjutnya responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 41 (45,04 %), berikutnya responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 5 (5,48%) dan tidak satupun Responden menjawab sangat tidak setuju.

Dari uraian hasil pernyataan responden mengenai Efektivitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang ada di desa Kubu Idapat dikatakan baik, meskipun hasil dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan mengindikasikan bahwa Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I yang ada masih belum maksimal dikarenakan masalah dana pembangunan, faktor Alam dan Respon dari Pemerintah Kabupaten yang belum mewujudkan semua perencanaan pembangunan yang di rencanakan pihak aparat desa.

#### **5.4.2 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan sejumlah negeri tetangga. Ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur itu tak hanya terlihat dari tertundanya proyek-proyek besar, tapi juga dapat dirasakan langsung dari kondisi jalan yang rusak, seretnya pengadaan air bersih, dan buruknya kondisi prasarana umum.

Sementara itu, banyak petani di desa tertinggal memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha (lahan marjinal). Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan (**Pedoman PPIP, 2008**)

Dari hasil observasi yang di lakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini terhadap pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I

**Tabel 5.11 : Data Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jenis Perencanaan Pembangunan	Jumlah Nominal Rp	Hasil Perencanaan
1.	Semenisasi jalan	Rp. 330.000.000	Belum terlaksana
2.	Pembangunan puskesmas	Rp. 400.000.000	Belum terlaksana
3.	Rumah layak huni	Rp. 146.000.000	Sudah terlaksana
4.	Pengadaan listrik	Rp. 400.000.000	Belum terlaksana
5.	Pembangunan jembatan	Rp. 470.000.000	Belum terlaksana
6.	Gedung sekolah	Rp. 345.000.000	Sudah terlaksana
7.	Sarana olahraga	Rp. 150.000.000	Belum terlaksana
8.	Pembangunan kantor penghulu	Rp. 470.000.000	Sudah terlaksana
9.	Pembangunan Sarana Ibadah	Rp. 40.000.000	Belum terlaksana
10.	Pembangunan Darmaga	Rp. 200.000.000	Belum terlaksana
Jumlah		Rp. 2.952.000.000	

*Sumber : hasil observasi dan data kepenghuluan Kubu I 2013*

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwasannya pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I tidak maksimal di tandai dengan masih belumnya terlaksana dari perencanaan pembangunan di desa Kubu I. Hasil dari observasi yang peneliti lakukan bahwasannya peneliti melihat pelaksanaan pembangunan di desa kubu I kurang maksimal karena banyak kendala dan hambatan yang pihak desa hadapi dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

### 1) Dana

Dana merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan

Infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I terkendala dengan dana karena dana yang minim Pada tahun 2013 dana pembangunan yang di berikan pemerintah Kabupaten Rokan Holir Sebesar Rp.1.000.000.000 untuk di pergunakan membangun sarana desa/ Infrastruktur desa namun Perencanaan pembangunan yang terlalu banyak maka tidak semua perencanaan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik.

## 2) **Kondisi Alam**

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan bahwasannya pelaksanaan pembangunan memiliki hambatan yaitu kondisi alam desa Kubu I yang kurang mendukung. Desa Kubu I memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang jadi masalah saat pembangunan berlangsung yaitu saat masuknya material pembangunan terkadang hujan dan jalan menjadi becek atau banjir akibatnya proses pelaksanaan pembangunan terhambat dan tidak bisa berjalan dengan baik.

Lain halnya dengan pernyataan bapak penghulu Kubu I yaitu

Bapak SUJONO ia mengatakan bahwasannya:

*“pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I pada tahun 2013 mulai membaik sudah ada dan nampak pembangunannya jika di bandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya di tandai dengan adanya pembangunan Kantor Penghulu Kubu I, pembangunan Sarana Pendidikan, SD dan SMP dengan anggaran dana kurang lebih Rp 1.000.000.000.*

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa kubu I pada tahun 2013 Mulai membaik jika di bandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya.

Untuk melihat jawaban responden tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.12 : Tanggapan Responden terhadap Pemahaman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	17	18,63 %
2.	Setuju	73	80,21 %
3.	Kurang Setuju	0	0 %
4.	Tidak Setuju	1	1.09 %
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden tersebut mengatakan setuju karena Masyarakat telah banyak mengetahui semua pelaksanaan pembangunan sebanyak 73 orang responden (80,21 %). Data yang diperoleh juga memberikan jawaban tidak setuju dengan jumlah 1 orang (1,09 %) karena mereka menilai dan merasakan bahwa tidak memahami bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesungguhnya. Untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur dapat di lihat dari tabel berikut;

**Tabel 5.13 :Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	1	1,09 %
2.	Setuju	2	2,19 %
3.	Kurang Setuju	21	23,07 %
4.	Tidak Setuju	27	29,67 %
5.	Sangat Tidak Setuju	40	43,95 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab sangat tidak setuju jika pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I sangat baik, dengan jumlah responden 40 orang (43,95 %), responden menjawab sangat tidak setuju karena masyarakat menganggap pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I masih rendah jika di bandingkan dengan desa- desa yang berada di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun responden yang menjawab setuju jika pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I baik sebanyak 2 orang (2,19 %) dikarenakan masyarakat menganggap sudah ada pembangunan contohnya bangunan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak RW 05 Desa Kubu I yaitu Bpk Caryotok beliau mengatakan :

*“pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I mulai membaik jika di bandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya di tandai dengan adanya bantuan rumah layak huni untuk masyarakat.namun jika di bandingkan dengan desa- desa lainnya Desa Kubu I merupakan desa yang tingkat pelaksanaan pembangunnya sangat rendah”*

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu Isangat rendah jika di bandingkan dengan desa- desa lainnya yang berada di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden tentang penerapan perencanaan pembangunan di Desa Kubu I dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 5.14 : Tanggapan Responden terhadap Penerapan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	1	1,09 %
2.	Setuju	9	9,89 %
3.	Kurang Setuju	11	12,08 %
4.	Tidak Setuju	27	29,67 %
5.	Sangat Tidak Setuju	43	47,25 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab sangat tidak setuju jika penerapan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I sangat baik, dengan jumlah responden 43 orang (47,25 %), responden menjawab sangat tidak setuju karena masyarakat menganggap penerapan pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I masih rendah dan tidak baik jika di bandingkan dengan desa- desa yang berada di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak RT 010 Desa Kubu I yaitu Bpk Mukhotip beliau mengatakan :



*“penerapan pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I tidak baik dan kurang Efektif banyak kendala yang di hadapi diantaranya sangat sulit transportasi Desa Kubu I berada di Pesisir pantai bagansiapiapi, itu juga merupakan hambatan untuk melaksanakan pembangunan di Desa Kubu I”*

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I sangat sulit ada faktor- faktor yang menghambat diantaranya transportasi, cuaca Alam di samping itu desa Kubu I juga daerahnya Sulit Untuk di Jangkau..

Di samping itu adapun responden yang menjawab setuju jika penerapan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I baik sebanyak 9 orang (9,89 %) dikarenakan masyarakat menganggap sudah ada pembangunan contohnya bangunan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu masyarakat menganggap penerapan pelaksanaannya baik.

**Tabel 5.15 : Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Pertanyaan	Frekuensi/Persentase					Jumlah Responden
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	Dengan adanya pemahaman Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur maka Pembangunan akan berjalan dengan baik.	17 (18,63)	73 (80,21)	0 (0)	1 (1,09)	0 (0)	91
2.	Semua Pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I sangat baik kondisinya.	1 (1,09)	2 (2,19)	21 (23,07)	27 (29,67)	40 (43,95)	91
3.	Penerapan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Sangat baik	1 (1,09)	9 (9,89)	11 (12,08)	27 (29,67)	43 (47,25)	91
<b>Jumlah</b>		19 20,82	84 92,29	32 35,15	55 60,43	84 91,2	273

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari indikator Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang menjawab setuju sebanyak 84 (92,29 %), kemudian responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 19 (20,82 %), selanjutnya responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 32 (35,15 %), berikutnya responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 55 (60,43 %) dan 84 (91,2 %) Responden menjawab sangat tidak setuju.

Dari uraian hasil pernyataan responden mengenai Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang ada di desa Kubu I dapat dikatakan tidak baik, meskipun dari hasil dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan mengindikasikan bahwa ada pembangunan yang ada di Desa Kubu I yaitu pembangunan rumah layak huni. Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I yang ada masih belum maksimal dikarenakan banyak hal diantaranya letak desa di pesisir pantai, jauh dari transportasi, jauh untuk di tempuh dan tidak adanya swadaya Masyarakat.

#### **5.4.3 Pengawasan Pembangunan Infrastruktur**

Menurut **Maringan (2004: 61)**, pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada

dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut **Husnaini (2001: 400)**, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

- (1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- (2) Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- (3) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.

Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Dari observasi yang penulis lakukan terhadap pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.16 Data Pengawasan Pembangunan di Desa Kubu I Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir**

No	Nama Instansi Pengawas	Jenis pembangunan
1.	Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK)	Rumah layak huni, Gedung sekolah, Pembangunan kantor penghulu,
2.	LPM	Rumah layak huni, Gedung sekolah, Pembangunan kantor penghulu,
3.	Pemerintah Desa	Rumah layak huni, Gedung sekolah, Pembangunan kantor penghulu,

*Sumber : Observasi dan data kepenghuluan Desa Kubu I 2013*

Dari tabel di atas bahwasannya Pelaksanaan Pengawasan pembangunan di desa Kubu I terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I sudah berjalan dengan baik hal ini sesuai dengan pendapat bapak Sekretaris Desa Kubu I yaitu Bapak Wawan Kartawan sebagai berikut:

*Pengawasan terhadap pembangunan di Desa Kubu I telah berjalan dengan baik dan maksimal. Diantara pengawasan yang kami tugaskan dalam mengawas pembangunan diantaranya LPM, BPK dan pemerintah Desa Pengawasan yang telah di lakukan telah berjalan dengan baik.*

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan pembangunan di Desa Kubu I telah berjalan dengan baik dan maksimal.

Untuk melihat jawaban responden tentang Pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.17 : Tanggapan Responden terhadap Pemahaman Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	15	16,48 %
2.	Setuju	74	81,31 %
3.	Kurang Setuju	2	2,19 %
4.	Tidak Setuju	0	0 %
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden tersebut mengatakan setuju karena Masyarakat telah banyak mengetahui atau memahami semua pengawasan pembangunan infrastruktur sebanyak

74 orang responden (81,31 %). Data yang diperoleh juga memberikan jawaban kurang setuju dengan jumlah 2 orang (2,19 %) karena mereka menilai dan merasakan bahwa tidak memahami tentang pengawasan pembangunan infrastruktur di desak Kubu I. Untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan ataupun kondisi pengawasan pembangunan Infrastruktur dapat di lihat dari tabel berikut;

**Tabel 5.18 : Tanggapan Responden terhadap Kondisi Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	1	1,09 %
2.	Setuju	30	32,96 %
3.	Kurang Setuju	38	41,75 %
4.	Tidak Setuju	15	16,48 %
5.	Sangat Tidak Setuju	7	7,69 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab kurang setuju jika kondisi pengawasan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I sangat baik, dengan jumlah responden 38 orang (41,75 %), responden menjawab kurang setuju karena masyarakat menganggap kondisi pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I masih rendah dan kurang maksimal. Adapun responden yang menjawab setuju jika kondisi pengawasan pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I baik sebanyak 30 orang (32,96 %) dikarenakan masyarakat menganggap pengawasan pembangunan sudah ada dan baik oleh LPM . Hal ini didukung oleh

pernyataan Bapak Sekretaris Desa Kubu I yaitu Bapak Wawan Kartawan beliau mengatakan :

*“pengawasan pembangunan Infrastruktur telah dilakukan oleh LPM di saat pembangunan Rumah Layak Huni untuk masyarakat kurang mampu, namun jika saya lihat pengawasan juga kurang maksimal yang di lakukan oleh LPM terhadap pembangunan infrastruktur di desa ini, jika melihat penomena ini maka kondisi pengawasan pembangunan di desa ini belum baik.”*

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I telah di laksanakan oleh LPM namun kurang maksimal.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden tentang penerapan pengawasan pembangunan di Desa Kubu I dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 5.19 : Tanggapan Responden terhadap Penerapan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	16	17,58 %
2.	Setuju	70	76,92 %
3.	Kurang Setuju	1	1,09 %
4.	Tidak Setuju	2	2,19 %
5.	Sangat Tidak Setuju	2	2,19 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju jika adanya pengawasan maka penerapan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I berjalan dengan lancar dan aman, dengan jumlah responden 70 orang (76,92 %), responden menjawab setuju karena masyarakat menganggap pengawasan sangat di perlukan dalam proses pelaksanaan

pembangunan di Desa Kubu I untuk menjaga agar tidak jadi penyelewengan dan penyalahgunaan dari program pembangunan sesungguhnya. Hal ini di kuatkan dengan pernyataan bapak RW 03 Desa Kubu I yaitu Bapak Mono ia menyatakan.

*“saya sangat setuju dengan adanya pengawasan secara otomatis harapannya dapat meminimalisir dari penyelewengan dan dapat mendukung agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan tanpa halangan”.*

Di samping itu adapun responden yang menjawab tidak setuju jika adanya pengawasan maka pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I berjalan dengan lancar dan aman sebanyak 2 orang (2,19 %) dikarenakan masyarakat menganggap ada atau tidaknya pengawasan tidak berpengaruh terhadap penerapan pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I.

**Tabel 5.20 : Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator Pengawasan Pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Pertanyaan	Frekuensi/Persentase					Jumlah Responden
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	Dengan Adanya Pemahaman Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur maka pembangunan Akan Berjalan Dengan Baik.	15 (16,48)	74 (81,31)	2 (2,19)	0 (0)	0 (0)	91
2.	Kondisi Pengawasan Terhadap pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I sangat Baik.	1 (1,09)	30 (32,96)	38 (41,75)	15 (16,48)	7 (7,69)	91
3.	Dengan Adanya Pengawasan Maka Penerapan Pembangunan Infrastruktur Berjalan Dengan Lancar dan aman.	16 (17,58)	70 (76,92)	1 (1,09)	2 (2,19)	2 (2,19)	91
Jumlah		32 (35,15)	174 (191,19)	41 (45,03)	17 (18,67)	9 (9,88)	273

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari indikator pengawasa Pembangunan Infrastruktur yang menjawab setuju sebanyak 174 (191,19 %), kemudian responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 32 (35,15 %), selanjutnya responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 41 (45,03 %), berikutnya responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 17 (18,67 %) dan 9 (9,88) Responden menjawab sangat tidak setuju.

Dari uraian hasil pernyataan responden mengenai Pengawasan Pembangunan Infrastruktur yang ada di desa Kubu I dapat dikatakan baik, meskipun dari hasil dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan mengindikasikan bahwa ada pengawasan pembangunan yang ada di Desa Kubu I tidak maksimal. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I yang ada masih belum maksimal dan berjalan dengan baik.

#### **5.4.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa**

Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Menurut Todaro dalam Bryant and White (1998) pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.



Seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat. Dalam RPJMN 2004-2009 dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting yakni sebagai :

- (1) tulang punggung produksi dan pola distribusi barang dan penumpang,
- (2) perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- (3) pemicu pembangunan suatu kawasan,
- (4) pembuka keterisolasian suatu wilayah, dan
- (5) prasyarat kesuksesan pembangunan di berbagai sektor.

Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan. Partisipasi

sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas.

Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.

Pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut, dengan pelibatan secara penuh masyarakat setempat dalam setiap tahapan (tahap perencanaan s/d tahap operasional dan pemeliharaan). Pelibatan masyarakat perdesaan dalam pembangunan infrastruktur perdesaan akan memberikan beberapa dampak, antara lain

- (1) kualitas pekerjaan yang dihasilkan,
- (2) keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut,
- (3) kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta
- (4) penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya.

Dari observasi yang penulis lakukan di Desa Kubu I ternyata partisipasi masyarakat sangat baik dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I dapat di lihat dari data dan fakta yang penulis temui sebagai berikut:

**Tabel 5.21 Data partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Kubu I Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir**

No	Jenis partisipasi	Keterangan
1.	Iuran Masyarakat	Iuran yang di laksanakan oleh masyarakat pertahun Rp. 50.000 per Kepala Keluarga
2.	Gotong royong	Selalu di laksanakan setiap bulan tanggal 5 untuk memperbaiki jika ada prasarana desa yang rusak.

*Sumber : Observasi dan data kepenghuluan Desa Kubu I 2013*

Dari observasi yang peneliti lakukan di desa Kubu I bahwasannya Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I sangat baik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari bapak Penghulu Kubu I yaitu Bapak SUJONO ia mengatakan:

*“Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu sangat baik dan mendukung, tanda bukti dari itu semua masyarakat sering bergotong royong jika aparat desa memerintahkan untuk bergotong royong, contohnya gotong royong jalan yang rusak, pembersihan sungai dan pembuatan jembatan”.*

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sangat baik dapat di buktikan adanya kegiatan masyarakat yaitu gotong royong yang di laksanakan masyarakat terhadap Desa Kubu I. Untuk melihat jawaban responden tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.22 : Tanggapan Responden terhadap Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	32	35,16 %
2.	Setuju	59	64,83 %
3.	Kurang Setuju	0	0 %
4.	Tidak Setuju	0	0 %
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden tersebut mengatakan setuju karena Masyarakat telah memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur sebanyak 59 orang responden (64,83 %). Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan Infrastruktur dapat di lihat dari tabel berikut;

**Tabel 5.23 : Tanggapan Responden terhadap Kesadaran Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan Infrastruktur**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	0	0 %
2.	Setuju	0	0 %
3.	Kurang Setuju	17	18,68 %
4.	Tidak Setuju	31	34,06 %
5.	Sangat Tidak Setuju	43	47,25 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab sangat tidak setuju jika masyarakat tidak memiliki kesadaran dalam berpartisipasi terhadap pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I, dengan jumlah responden 43 orang (47,25%), responden menjawab kurang setuju

karena masyarakat menganggap bahwa mereka memiliki kesadaran yang kuat dalam berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Penghulu Kubu I yaitu Bapak Sujono beliau mengatakan :

*“masyarakat sangat mendukung pembangunan di Desa Kubu I, dan mereka sangat berpartisipasi dalam pembangunan di desa ini, mereka selalu bergotong royong jika ada pembangunan yang akan di laksanakan di desa ini.”*

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat sangat tinggi untuk berpartisipasi terhadap pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I .

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh atau tidaknya masyarakat terhadap pembangunan di Desa Kubu I dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 5.24: Tanggapan Responden terhadap pengaruhnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	1	1,09 %
2.	Setuju	2	2,19 %
3.	Kurang Setuju	10	10,98 %
4.	Tidak Setuju	32	35,16 %
5.	Sangat Tidak Setuju	46	50,54 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab sangat tidak setuju jika masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I, dengan jumlah responden 46 orang (50,54%), responden menjawab sangat tidak setuju karena masyarakat

menganggap bahwa mereka sangat berpengaruh dalam pembangunan di Desa Kubu I. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Ali sebagai masyarakat Kubu I beliau mengatakan :

*“ masyarakat memiliki peran yang sangat aktif dalam pembangunan di desa Kubu I, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kami sebagai masyarakat selalu ada jika di butuhkan oleh desa, ketika jalan rusak kami masyarakat selalu bergotong royong untuk memperbaiki jalan tersebut. Jadi menurut saya masyarakat memilki pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kubu I.*

Di samping itu adapun responden yang menjawab setuju jika masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I sebanyak 2 orang (2,19 %) dikarenakan masyarakat kurang berpartisipasi dalam ikut serta terhadap pembangunan di Desa Kubu I.

**Tabel 5.25 : Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Pertanyaan	Frekuensi/Persentase					Jumlah Responden
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	Sebagai Masyarakat Maka Kami Berkewajiban Untuk berpartisipasi dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I	32 (35,16)	59 (64,83)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	91
2.	Masyarakat tidak memilki kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I kec. Pekaitan Kab. Rohil	0 (0)	0 (0)	17 (18,68)	31 (34,06)	43 (47,25)	91
3.	Masyarakat Tidak Berpengaruh untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kaec. Pekaitan Kab. Rohil	1 (1,09)	2 (2,19)	10 (10,98)	32 (35,16)	46 (50,54)	91
Jumlah		33 (36,25)	61 (67,02)	27 (29,66)	63 (69,22)	89 (97,79)	273

**Sumber :** Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari indikator partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur yang menjawab setuju sebanyak 61 (67,02 %), kemudian responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 33 (36,25 %), selanjutnya responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 27 (29,66 %), berikutnya responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 63 (169,22 %) dan 89 (97,79%) Responden menjawab sangat tidak setuju.

Dari uraian hasil pernyataan responden mengenai Partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I sangat baik, meskipun dari hasil dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan mengindikasikan bahwa ada masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Desa Kubu I. Partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I sangat baik.

#### **5.5.5 Evaluasi Pembangunan**

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Evaluasi menurut PP 39/2006, adalah Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Masukan untuk perencanaan yang akan datang.

Menurut PP 39/ 2006, disebutkan bahwa Monitoring merupakan kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal, dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk Mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala, menganalisis data yang telah diperoleh dari Monitoring untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Evaluasi berdasar SPPN Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. Adapun proses Evaluasi Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Manfaat Evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

Dari observasi yang penulis lakukan terhadap Evaluasi pembangunan yang di laksanakan di Desa Kubu I dapat di lihat dari data pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 5.26: Data Evaluasi yang di laksanakan pada pembangunan di Desa Kubu I tahun 2013**

No	Pelaksana Evaluasi	Kinerja
1.	Dinas Inpekstorat Kabupaten Rokan Hilir	Baik
2.	Bapemas	Baik
3.	Kabag Pemerintahan Desa	Baik

*Sumber. Observasi dan kepenghuluan Kubu I 2013*

Dari tabel berikut bahwasannya Evaluasi yang di laksanakan pihak terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan telah berjalan dengan baik.

Untuk melihat jawaban responden tentang Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.27 : Tanggapan Responden terhadap Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	2	2,19 %
2.	Setuju	75	82,41 %
3.	Kurang Setuju	12	13,18 %
4.	Tidak Setuju	2	2,19 %
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden tersebut mengatakan setuju karena Masyarakat telah mengetahui

tentang evaluasi pembangunan infrastruktur sebanyak 75 orang responden (82,41 %). Untuk mengetahui efektif atau tidaknya Evaluasi pembangunan Infrastruktur yang di laksanakan pihak terkait dapat di lihat dari tabel berikut;

**Tabel 5.28 : Tanggapan Responden terhadap Efektifitas Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Desa Kubu I**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	3	3,29 %
2.	Setuju	45	49,45 %
3.	Kurang Setuju	32	35,16 %
4.	Tidak Setuju	6	6,59 %
5.	Sangat Tidak Setuju	5	5,49 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju masyarakat menganggap Evaluasi pembangunan yang laksanakan oleh Desa sudah efektif. dengan jumlah responden 45 orang (49,45%), responden menjawab setuju karena masyarakat menganggap bahwa Evaluasi yang di lakukan desa terhadap pembangunan sudah baik dan efektif. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Sekretaris Desa Kubu I yaitu Bapak Wawan Kartawan beliau mengatakan :

*“Evaluasi yang di lakukan oleh Desa sudah maksimal terhadap pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, contoh evaluasi yang telah kami laksanakan*

*yaitu pembangunan rumah layak huni dan hasilnya baik telah maksimal.”*

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Evaluasi yang di laksanakan oleh Desa sangat Baik terhadap pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I .

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden mengenai manfaat Evaluasi bagi pembangunan di Desa Kubu I dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 5.29 : Tanggapan Responden terhadap pengaruh Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Desa Kubu I untuk Pembangunan periode berikutnya**

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	27	29,67 %
2.	Setuju	59	64,83 %
3.	Kurang Setuju	3	3,29 %
4.	Tidak Setuju	2	2,19 %
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		91	100 %

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari data diatas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju jika Evaluasi pembangunan berpengaruh terhadap pembangunan di masa yang akan datang. dengan jumlah responden 57 orang (64,83%), responden menjawab sangat setuju karena masyarakat menganggap bahwa

Evaluasi pembangunan yang di lakukan sangat berpengaruh untuk pembangunan selanjutnya.

**Tabel 5.30 : Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

No	Pertanyaan	Frekuensi/Persentase					Jumlah Responden
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	Saya sebagai masyarakat mengetahui Mengenai Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I yang di lakukan pihak terkait	2 (2,19)	75 (82,41)	12 (13,18)	2 (2,19)	0 (0%)	91
2.	Evaluasi yang di lakukan oleh pihak terkait sangat efektif dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I kec. Pekaitan Kab. Rohil	3 (3,29)	45 (49,45)	32 (35,16)	6 (6,59)	5 (5,49)	91
3.	pengaruh Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Desa Kubu I Sangat Bermanfaat terhadap Pembangunan periode berikutnya	27 (29,67)	59 (64,83)	3 (3,29)	2 (2,19)	0 (0%)	91
Jumlah		32 (35,15)	179 (196,69)	47 (51,63)	10 (10,97)	5 (5,49)	273

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari indikator Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I setuju sebanyak 179 (196,69 %), kemudian responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 32 (35,15%), selanjutnya responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 47 (51,63%), berikutnya responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 10 (10,97%) dan 5 (5,49%) Responden menjawab sangat tidak setuju.

Dari uraian hasil pernyataan responden mengenai Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I sangat baik, meskipun dari hasil

dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan mengindikasikan bahwa Evaluasi pembangunan infrastruktur di desa Kubu I belum maksimal dalam mengevaluasi pembangunan yang ada di Desa Kubu I.

## 5.5 Pembahasan

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan wawancara dalam penjelasan diatas, maka berikut ini akan dijelaskan pembahasan tentang hasil rekapitulasi dari keseluruhan penelitian, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.31 : Rekapitulasi Keseluruhan Jawaban Responden**

No	Tabel	SS		S		KS		TS		STS	
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
1	5.6	19	20,87	57	62,63	13	14,28	2	2,19	0	0
2	5.7	7	7,69	54	59,34	27	29,67	3	3,29	0	0
3	5.8	26	28,57	64	70,32	1	1,09	0	0	0	0
4	5.10	17	18,63	73	80,21	0	0	1	1,09	0	0
5	5.11	1	1,09	2	2,19	21	23,07	27	29,67	40	43,95
6	5.12	1	1,09	9	9,89	11	12,08	27	29,67	43	47,25
7	5.14	15	16,48	74	81,31	2	2,19	0	0	0	0
8	5.15	1	1,09	30	32,96	38	41,75	15	16,48	7	7,69
9	5.16	16	17,58	70	76,92	1	1,09	2	2,19	2	2,19
10	5.18	32	35,16	59	64,83	0	0	0	0	0	0
11	5.19	0	0	0	0	17	18,68	31	34,06	43	47,25
12	5.20	1	1,09	2	2,19	10	10,98	32	35,16	46	50,54
13	5.22	2	2,19	75	82,41	12	13,18	2	2,19	0	0
14	5.23	3	3,24	45	49,45	32	35,16	6	6,59	5	5,49
15	5.24	27	29,67	59	64,83	3	3,29	2	2,19	0	0
Jumlah		168	184,44	673	739,48	188	206,51	150	212,29	186	204,36

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014*

Dari rekapitulasi tabel di atas dapat diketahui Frekuensi option sebagai berikut :

$$A = 168$$

$$B = 673$$

$$C = 188$$

$$D = 150$$

$$E = 186$$

Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$N = Fa + Fb + Fc + Fd + Fe$$

$$= 168 + 673 + 188 + 150 + 186$$

$$= 1365$$

Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara memberikan bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu :

Option A dengan bobot 5

Option B dengan bobot 4

Option C dengan bobot 3

Option D dengan bobot 2

Option E dengan bobot 1

Dari bobot yang telah diberi nilai di atas, maka dapatlah diperoleh F sebagai berikut :

$$\text{Frekuensi option } A = 168 \times 5 = 840$$

$$\text{Frekuensi option } B = 673 \times 4 = 2692$$

$$\text{Frekuensi option } C = 188 \times 3 = 564$$

$$\text{Frekuensi option } D = 150 \times 2 = 300$$

$$\text{Frekuensi option } E = 186 \times 1 = 186$$

$$\text{Jumlah } F = 4582$$

Berdasarkan jumlah yang telah diperoleh di atas maka dapat dicari persentase rata-rata kualitatifnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} P &= \frac{F}{N} \times 100 \div 5 \\ &= \frac{100 \cdot F}{5 \cdot N} \\ &= \frac{100 (F)}{5 (N)} \\ &= \frac{100 \times 4582}{5 \times 1365} \\ &= \frac{458200}{6825} \\ &= 67,13 \end{aligned}$$

Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh di atas adalah pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk memahami baik atau tidaknya pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I tersebut maka akan diberi ukuran, menurut Suharsimi Ari Kunto sebagai berikut :

Tinggi/Maksimal	: 76-100%
Cukup/Kurang	: 56-75%
Tidak Maksimal/Rendah	: 40-45%
Sangat Tidak Maksimal/Sangat Rendah	: 0-39%

Dari rekapitulasi kuesioner tentang pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dalam kategori yang Kurang baik, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 67,13 %. berdasarkan

observasi dan wawancara yang penulis lakukan ternyata pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I sangat rendah masih belum terlaksana dari perencanaan pembangunan yang di rencanakan oleh pemerintah Desa.

#### **5.6 Faktor- factor penghambat pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kubu I**

Hasil observasi yang penulis temukan bahwasannya dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di desa Kubu I memiliki kendala dan hambatan diantaranya adalah:

##### **1. Kondisi Keuangan / Dana**

Hasil observasi yang penulis temukan bahwasannya dana yang di berikan oleh pihak kabupaten kepada desa Kubu I pada tahun anggaran 2013 sebanyak Rp. 1.000.000.000. perencanaan yang di usulkan desa ke Kabupaten senilai Rp. 2.951.000.000. jadi dana yang di berikan oleh kabupaten kepada desa tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I.

##### **2. Kondisi Alam**

Kondisi alam sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kubu I. Di wilayah desa Kubu I memilki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang jadi permasalahan ketika pelaksanaan pembangunan telah berlangsung saat itu pula musim hujan datang maka pelaksanaan pembangunan terbengkalai dan tidak terlaksana akibatnya susah untuk belanja material bangunan karena jalan rusak.kondisi geografis desa Kubu I yang sangat jauh, oeh karena itu pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I kurang maksimal.